

Peran Relawan Politik Dalam Konstelasi Politik Indonesia

Amalia Syauket

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: amalia.syauket@dsn.ubharajaya.ac.id

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v8i1.1052](https://doi.org/10.59999/v8i1.1052)

Received:
28-02-2022

Revised:
19-03-2022

Accepted:
27-03-2022

Abstract: *Direct general elections are the first pillar of democracy in Indonesia, by adhering to a one man, one vote system which requires that anyone who wants a political seat in the government must get the most votes. The presence of volunteers is important for the masses who support one candidate in both the Pilkada and the Presidential Election. The phenomenon of the emergence of this volunteer declaration has begun to emerge, at least we can see it from various reports in the mass media and social media. The presence of political volunteers is a manifestation of the increasing active participation of citizens in substantial democracy. Political volunteers who work offline and online are able to increase community participation which is the key to the presence of an extra-parliamentary democratic government model. By using a qualitative-descriptive approach, the researcher intends to describe the role of political volunteers in the Indonesian political constellation. The results of this study show the phenomenon of political volunteers in the Indonesian Political Constellation as if they have become the main pillars of democratic institutionalization with the way that each moves independently to support their respective candidates so that it can be the starting point of the dynamics of the transformation of political values with patrimonial, oligarchic nuances. towards volunteerism and participation.*

Keywords: *The Concept of Political Volunteers, Participatory Democracy and Extra-Parliamentary Democracy*

License:
Copyright (c)
2022 Amalia
Syauket

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.



Abstrak: Pemilihan Umum langsung merupakan pilar pertama dalam ber Demokrasi di Indonesia , dengan menganut sistem one man, one vote dimana mengharuskan siapapun yang menginginkan kursi politik dipemerintahan harus mendapat suara pemilih terbanyak. Kehadiran relawan menjadi penting bagi massa yang mendukung salah satu calon baik di Pilkada maupun Pilpres. Fenomena kemunculan deklarasi relawan ini mulai bermunculan setidaknya bisa kita lihat dari berbagai pemberitaan dimedia massa dan media sosial. Kehadiran relawan politik sebagai manifestasi dari meningkatnya partisipasi aktif warga masyarakat dalam berdemokrasi substantial. Relawan politik yang bergerak secara offline maupun online mampu meningkatkan partisipasi masyarakat yang menjadi kunci kehadiran model pemerintahan demokrasi ekstra parlemen. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, peneliti bermaksud menggambarkan bagaimana peran relawan politik dalam konstelasi politik Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan Fenomena relawan politik Dalam Konstelasi Politik Indonesia seolah-olah telah menjadi pilar utama

pelembagaan demokrasi dengan caranya masing-masing bergerak sendiri untuk mendukung kandidat masing-masing sehingga dapat menjadi titik awal dari dinamika transformasi nilai-nilai politis yang bernuasa patrimonial, oligarkis menuju volunterisme dan partisipatoris.

Kata kunci: Konsep Relawan Politik, Demokrasi Partisipatoris Dan Demokrasi Ekstra Parlementer.

PENDAHULUAN

Gerakan relawan (voluntarisme) politik mengemuka dalam pemilihan presiden dan juga kepala daerah (pilkada) pasca orde baru di Indonesia¹. Menurut Gerri Bermara² maraknya gerakan relawan politik atau voluntarisme politik beberapa tahun belakangan, mencuri perhatian publik. Kerelawanan politik muncul disebabkan kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik (parpol). Karena Parpol cenderung transaksional. Mesin politik sulit untuk bergerak menembus langsung para pemilih, karena sekat-sekat ideologis atau bahkan citra buruknya elit politis, sehingga sulit menyapa pemilih secara langsung atau bahkan merebut hati pemilih. Gerakan kerelawanan menganggap partai politik sudah tidak sebangun dan sejalan dengan aspirasi public. sekarang ini rekrutmen politik terhadap calon pemimpin nasional dan daerah bersifat elitis, oligarki dan bersifat transaksional atau *wani piro*. Bambang Arianto, 2014³ menyatakan relawan politik hadir dalam kontestasi disebabkan oleh lemahnya peran partai politik sebagai rahim ideologis bagi calon pemimpin republic. Akumulasi dari kekecewaan public terhadap kinerja partai politik yang akhirnya melahirkan gerakan relawan politik. Relawan politik lebih luas segmentasi pemilih, sebab tidak terikat oleh jejaring partai politik.

Perluasan partisipasi publik ini diharapkan dapat memunculkan kembali kekuatan kekuatan sosial non-partai yang selama ini tergerus oleh dominasi kaum oligarki dan arus utama partai politik. Relawan politik dalam konteks ini tidak dapat dikategorikan sebagai partisipasi yang dimobilisasi, sebab partisipasi yang lahir adalah partisipatif sukarela (otonomi) baik melalui aksi jalanan (offline) dan online⁴.

Fenomena relawan politik merupakan suatu hal yang positif, artinya publik sekarang punya partisipasi politik yang meningkat. Namun demikian keberadaan relawan harus direspon dengan baik dan kehati-hatian agar tidak menimbulkan oklokasi atau kepemimpinan massa.

¹ Carlos KY Paath, 'Relawan Politik Muncul Karena Rasa Kecewa Terhadap Parpol', *Berita Satu*, 2016 <<https://www.beritasatu.com/nasional/370635/relawan-politik-muncul-karena-rasa-kecewa-terhadap-parpol>>.

² Gerri Bermara, 'Relawan Politik Altruisme Atau Investasi', *Banten Hits*, 6 November 2016 <<https://bantenhits.com/2016/11/06/relawan-politik-altruisme-atau-investasi/>>.

³ Bambang Arianto, 'Fenomena Relawan Politik Dalam Kontestasi Presidensial', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 18.2 (2014) <<https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jsp.13128>>.

⁴ Arianto.

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul Peran Relawan Politik Dalam Konstelasi Politik Indonesia dalam ranah ilmu politik-pemerintahan, menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan struktur Neo-institusional yang focus perhatian pada hubungan antara institusi-institusi yang ada dengan actor-aktor politik (*agency*), performa dari institusi tersebut dalam mencapai tujuan komunal, serta perubahan-perubahan yang terjadi pada institusi tersebut. Sedangkan metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kenyataan yang sekarang ini tentang fenomena relawan politik secara akurat.

PEMBAHASAN

Konsep Relawan Politik

Era reformasi memungkinkan lahirnya ratusan organisasi relawan politik di Indonesia. Geliat politik di Indonesia setelah reformasi dimeriahkan oleh kelompok-kelompok relawan. Mereka lahir dan tumbuh karena dukungan kepada pihak tertentu, meski bergerak lebih mandiri⁵.

Secara konstitusional, perlindungan HAM merupakan kewajiban negara, yang diatur dalam UUD 1945, yakni pasal 28 A s.d Pasal 28 J. Salah satu HAM setiap warga negara dalam bidang hukum tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1), pada pokoknya bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan adanya suatu kepastian hukum, serta hak atas perlakuan yang sama di depan hukum. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Deklarasi Umum HAM, dimana dalam Pasal 7, pada pokoknya bahwa hak atas perlindungan hukum, perlakuan dan kedudukan yang sama di depan hukum merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali.

Marcin Walecki, 2009⁶ menyebut relawan ini sebagai partai ketiga—organisasi yang mempengaruhi hasil pemilu, tapi dia bukan pelaku atau partai politik peserta pemilu. Praktik ini memang lazim terjadi di negara-negara yang berdemokrasi.

Dalam historiografi politik, istilah relawan (*volunteer*) dikembangkan semenjak tahun 1755 oleh seorang Perancis M. Fr *Voluntaire* ketika memberi pelayanan kepada tentara yang sedang berperang. Tugasnya adalah mengabdikan secara ikhlas dalam kegiatan altruistik untuk mendorong, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas kehidupan di bidang sosial, budaya dan ekonomi.

Istilah relawan diambil dari bahasa Jerman “aktivismus” yang muncul pada akhir perang dunia pertama. Istilah ini kemudian digunakan untuk menandai prinsip keterlibatan politik secara aktif oleh kaum intelektual. Bukan hanya pemikiran, tetapi juga usaha untuk membela dan mewujudkan pemikiran tersebut disebut “aktivisme”. Aktivismus ini merupakan bagian dari ekspresionisme, yang saat itu memiliki nilai politik

⁵ Nurhadi Cahyo, ‘Relawan Politik: Mereka Yang Terpanggil Untuk Bergerak’, *VOA Indonesia*, 16 April 2019 <<https://www.voaindonesia.com/a/relawan-politik-mereka-yang-terpanggil-untuk-bergerak/4877691.html>>.

⁶ Marcin Walecki, *Political Finance in Georgia* (IPSA/IFES, 2009).

sangat kuat. Biasanya aktivisme dihubungkan dengan Kurt Hiller, pengarah organisasi Neuer Club yang menaungi para penyair ekspresionis awal; maupun Franz Pfemfert, pendiri majalah Die Aktion pada 1911 yang sangat politis. Dalam berbagai pengertian itu, kaum militan maupun aktivisme akhirnya dapat dikatakan sebagai bagian dari relawan (*volunteer*)⁷.

Relawan politik bukan bagian dari anggota partai politik. Kehadiran para relawan bukan karena daya tarik partai politik melainkan kepada politik nilai yang melampaui kepentingan partai. Bahkan, kehadiran relawan politik dapat disinergikan dengan tim sukses pemenangan kampanye sebuah partai politik karena fungsi mobilisasi yang lebih massif⁸.

Menurut Savirani⁹, relawan politik dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok. **Pertama**, relawan yang berasal dari mantan aktivis yang terlibat dalam kisaran tahun 1990-an atau lebih dikenal sebagai aktivis gerakan pro-demokrasi untuk menggulingkan rezim Soeharto. **Kedua**, adalah aktivis dari berbagai organisasi non-pemerintah mulai dari gerakan anti-korupsi, petani dan kelompok masyarakat adat. **Ketiga**, adalah seniman dan orang-orang di sektor kreatif. Kelompok pertama dan kedua memiliki agenda politik, namun sayangnya tidak memiliki massa yang jelas. Berbeda dengan kelompok ketiga yang tidak memiliki agenda politik tetapi memiliki banyak jejaring massa dari semua lapisan masyarakat. Hal itu disebabkan bekal popularitas yang dimiliki oleh para artis dan seniman sehingga dapat menarik lebih banyak pendukung dan pengikut.

Namun, menurut Samah dan Susanti¹⁰ tidak semua komunitas relawan politik memiliki visi dan misi yang sama. Berdasarkan aktivitas kegiatan, ada tiga kategori relawan politik yaitu; **Pertama**, relawan narsis adalah mereka yang sekedar mencari popularitas. Seperti membuat spanduk dukungan disertai foto dirinya sendiri. **Kedua**, relawan rente, yakni relawan yang sering membuat berbagai kegiatan dan aktivitas dukungan terhadap kandidat, namun dengan tujuan dan target mencari keuntungan semata. Para relawan ini biasanya menjadi event organizer dalam suatu acara dukungan dan mengedarkan proposal untuk pelaksanaan acara tersebut, yang tujuan akhirnya mendapatkan laba dari acara tersebut. **Ketiga**, relawan fans club, adalah mereka yang aktivitasnya hanya memuji-muji apapun yang dilakukan Kandidat dan marah-marah jika ada yang memojokkannya. Para relawan ini tidak akan segan-segan membela jika kandidatnya dihina di media sosial. Biasanya jenis relawan politik ini berasal dari anak-anak muda dan artis. Samah dan Susanti¹¹ menjelaskan dalam Infografis dibawah ini

⁷ Suhardi Suryadi, 'Relawan Politik', *Prisma Indonesia*, 2014.

⁸ Arianto.

⁹ Amalinda Savirani, 'Jokowi's Supporters Are to Doubt the "Indonesian Obama"', *The Conversation*, 2015 <<https://theconversation.com/jokowis-supporters-are-starting-to-doubt-the-indonesian-obama-37843>>.

¹⁰ Kristin Samah and Fransisca ria Susanti, *Berpolitik Tanpa Partai, Fenomena Relawan Dalam Pilpres* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014).

¹¹ Samah and Susanti.

Empat Tipe Relawan



Sumber: Kristin Samah dan Fransisca Ria Susanti, 2014, "Berpolitik Tanpa Partai, Fenomena Relawan Dalam Pilpres." - K12

📍 pinterpolitik | 📱 pinterpolitikdotcom | 📺 pinterpolitik

P

Tipe relawan **keempat** yaitu relawan investor, berupa perusahaan yang bergantung pada keputusan pada calon pejabat dengan cara terus membiayai partai dan kandidat karena memiliki kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Relawan Investor itu bekerja dengan target tertentu yang jauh lebih besar dan berjangka panjang; berani memodali, bahkan membandari sendiri kegiatan dukungannya terhadap calon itu dengan uang atau logistiknya sendiri. Alih-alih merancang, menawarkan gagasan-gagasan cerdas dan ikhlas, berpikir dan berkomitmen untuk kepentingan publik, tipe relawan ini biasanya memiliki sejumlah agenda setting (terutama ekonomi-politik) pasca pemilu/pilkada yang diproyeksikan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya¹². Tipe relawan inilah yang di kemudian hari potensial menjadi barisan shadow state atau shadow government yang bakal mengganggu cagub-cawagub terpilih dalam menjalankan pemerintahan kelak. Mereka bisa menjadi “kerikil” dalam sepatu Gubernur-Wagub terpilih¹³.

Artinya, berbagai aktivitas tersebut ditujukan untuk kepentingan bersama. Dalam hal ini para volunteer sering bersikap proaktif dan bukan reaktif dalam membantu kelompok atau organisasi guna melahirkan masyarakat yang sejahtera^{14, 15}. Dan Pada akhirnya jiwa yang dimiliki para relawan dapat menjadi aspek kunci dari masyarakat sipil dalam upaya pelebagaan demokrasi yang lebih partisipatoris^{16, 17}

Fenomena baru demokrasi Indonesia ini dapat dikategorikan sebagai kebangkitan politik sipil yang menandai kembalinya partisipasi publik. Kebangkitan politik sipil dapat ditelusuri melalui kehadiran relawan politik yang tersebar di seluruh Indonesia tanpa sekat

¹² Magnus Ohman, *Pedoman Pengawasan Kenangan Politik* (International Foundation for Electoral Systems, 2013).

¹³ Bermara.

¹⁴ J Wilson, *Volunteering. Annual Review of Sociology*, 2000.

¹⁵ J Wilson, 'Volunteerism Research: A Review Essay', *Nonprofit & Voluntary Sector Quarterly*, 41.2 (2012), 176–212.

¹⁶ Rene Bekkers, 'Participation in Voluntary Associations: Relations with Resources, Personality, and Political', *Political Psychology*, 26.3 (2005).

¹⁷ Penny Edgell Becker and Pawan H Dhingra, 'Religious Involvement and Volunteering: Implications for Civil Society', *Journal of Democracy*, 62.3 (2001).

agama, etnis atau ras (primordialisme). Relawan politik ini kemudian menciptakan asosiasi sipil secara spontan dengan mengedepankan kepercayaan publik tanpa diperintah oleh partai politik apapun. Disini kepercayaan (trust) sangat diperlukan guna membentuk integrasi sosial, antara citizen dan lembaga-lembaga demokratis yang dinamis dalam sebuah asosiasi¹⁸.

Relawan Politik membangun Demokrasi Partisipatoris

Gerakan non-partisan seperti yang ditunjukkan oleh relawan politik telah mampu mendorong perubahan dari luar sistem politik formal, yang selama ini belum mampu menghasilkan perubahan yang signifikan. Kemunculan serpihan-serpihan gerakan sosial non-partisan yakni relawan politik— telah mampu menumbangkan oligarkis partai politik yang sekaligus membangun pelembagaan demokrasi partisipatoris. Dalam hal ini demokrasi partisipatoris diartikan sebagai demokrasi yang melibatkan seluruh masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan publik, baik langsung maupun tidak langsung, dimana rakyat dapat mengajukan usul, masukan mengenai kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah¹⁹.

Bila demokrasi partisipatoris dapat terlembaga dengan baik, maka hal itu akan menjadi salah satu faktor kunci kehadiran model pemerintahan demokrasi ekstra parlementer—yang mana model ini merupakan pencerminan dari aktivitas politik yang diselenggarakan oleh kelompok-kelompok terutama relawan politik diluar institusi-institusi resmi negara. Disini peran relawan politik diupayakan dapat mengontrol, mengawasi, meningkatkan serta memberikan masukan seputar kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah. Sehingga, akan selaras dengan kehendak rakyat dalam penyelenggara kehidupan bernegara²⁰.

Jika mengacu pada tulisan Aspinal²¹ fenomena ini menunjukkan tengah terjadi peningkatan partisipasi gerakan sosial, meskipun pada realitasnya masih terbatas dan terfragmentasi. Hal senada juga dikemukakan Nina Eliasoph²² relawan terbukti mampu meningkatkan partisipasi publik.

Fenomena ini mengkonfirmasi pendapat Verba, Schlozman, dan Brady (1995)²³ yakni partisipasi warga negara adalah jantung demokrasi. Artinya, dengan segala plus-minusnya, relawan politik mampu membangkitkan semangat demokrasi di negeri ini, yang sudah mulai mengarah ke wujud inti dari demokrasi atau demokrasi ideal. Inilah dimensi riil demokrasi kerakyataan yang berproses dan bergerak dari bawah ke atas. Bukan sebaliknya, yakni demokrasi elitis yang hanya dimonopoli oleh sebagian elite politik

¹⁸ Jean Cohen, *Trust, Voluntary Association and Workable Democracy: The Contemporary American Discourse of Civil Society* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999).

¹⁹ AF Fikri and Akhmad, *Menjadi Politisi Ekstra Parlementer* (Yogyakarta: LKIS, 1999).

²⁰ Arianto.

²¹ Edward Aspinal, 'The Triumph of Capital? Class Politics and Indonesian Democratisation', *Journal of Contemporary Asia*, 43.2 (2013), 226–42.

²² Nina Eliasoph, *The Politics of Volunteering* (Cambridge: Polity Press, 2013).

²³ Sidney Verba, Kay Lehman Schlozman, and Henry E Brady, *Voice and Equality, Civi Voluntarism in American Politics* (Cambridge: Harvard University Press, 1995).

sebagai pelaku utama.

Demokrasi Ekstra Parleментар

Relawan politik dapat berperan sebagai pengawas dan pengimbang terhadap kekuasaan negara atau yang lebih dikenal dengan model demokrasi berkarakter ekstra parlementer. Hal itu disebabkan karena di negara yang sudah mapan dan paling demokratis sekalipun tidak ada suatu jaminan bahwa trias politika mengenai pembagian kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif) dapat berjalan dengan baik dan ideal. Alhasil, untuk membangun demokrasi berkarakter ekstra parlementer perlu adanya pilar kelima dari pelembagaan demokrasi yakni relawan politik.

Selama ini kita hanya mengenal pilar demokrasi terdiri dari partai politik mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat (ormas). Harapannya relawan politik dapat menjadi respons terhadap ketidakadilan sosial dan otoritarianisme negara. Artinya, relawan politik dapat menjadi tulang punggung gerakan sosial dan pemberdayaan masyarakat²⁴. Dalam upaya membangun model demokrasi berkarakter ekstra parlementer ada beberapa hal yang perlu dibangun oleh para relawan politik, diantaranya. **Pertama**, relawan politik diharapkan menawarkan wacana pemikiran alternatif di tingkat ideologi sebagai jalan lain atau tandingan bagi konsep kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintahan. **Kedua**, relawan politik dituntut bukan sekadar hanya mampu berwacana, melainkan juga memberikan contoh nyata mengenai penerapan di lapangan. Hal itu dapat terlihat sesaat Komjen Budi Gunawan ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), reaksi dan respon publik yang dimotori relawan politik begitu menarik perhatian—baik melalui aksi jalanan maupun di media sosial. Protes publik atas pencalonan Kepala Polri (Kapolri) tersebut, sebagai pertanda bila peran relawan politik telah mampu menyandingkan wacana publik dengan pemerintah—sekaligus alat kontrol tentang apa yang sedang dan akan dilakukan pemerintah. Hal itu menegaskan bahwa respon dan partisipasi aktif terlahir lebih kepada dinamika politik media sosial yang bergerak dinamis dalam upaya mewujudkan politik bersih.

Ketiga, relawan politik diharapkan mampu menyediakan berbagai informasi yang berguna bagi publik terutama seputar kebijakan pemerintahan. Informasi ini sejatinya mampu menjadi suplemen bagi pemberdayaan, pendidikan politik melalui jejaring diskusi secara reguler—baik yang dimulai dari kota sampai ke komunitas-komunitas basis di desa. Kondisi ini menciptakan suasana dan mendorong orang saling berdiskusi dan melahirkan partisipasi aktif. **Keempat**, relawan politik dapat memainkan peran sebagai pemimpin perubahan. Hal itu disebabkan karena para relawan politik dapat bergerak bebas dan tidak terikat oleh partai politik tertentu. Bahkan, para relawan politik dapat dengan mudah untuk membubarkan diri²⁵.

²⁴ Arianto.

²⁵ Arianto.

KESIMPULAN

Fenomena relawan politik Dalam Konstelasi Politik Indonesia seolah-olah telah menjadi pilar utama pelembagaan demokrasi dengan caranya masing-masing bergerak sendiri untuk mendukung kandidat masing-masing sehingga dapat menjadi titik awal dari dinamika transformasi nilai-nilai politis yang bernuasa patrimonial, oligarkis menuju volunterisme dan partisipatoris.

SARAN

Agar relawan politik mampu merevitalisasi secara kelembagaan -ideology kerelawanan agar tidak melenceng dari tujuan semula. Dan kepada partai politik perlu melakukan kanalisasi terhadap berbagai aspirasi publik terkait dengan calon pemimpin nasional maupun daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arianto, Bambang, 'Fenomena Relawan Politik Dalam Kontestasi Presidensial', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 18.2 (2014) <<https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jsp.13128>>
- Aspinall, Edward, 'The Triumph of Capital? Class Politics and Indonesian Democratisation', *Journal of Contemporary Asia*, 43.2 (2013), 226–42
- Becker, Penny Edgell, and Pawan H Dhingra, 'Religious Involvement and Volunteering: Implications for Civil Society', *Journal of Democracy*, 62.3 (2001)
- Bekkers, Rene, 'Participation in Voluntary Associations: Relations with Resources, Personality, and Political', *Political Psychology*, 26.3 (2005)
- Bermara, Gerri, 'Relawan Politik Altruisme Atau Investasi', *Banten Hits*, 6 November 2016 <<https://bantenhits.com/2016/11/06/relawan-politik-altruisme-atau-investasi/>>
- Cahyo, Nurhadi, 'Relawan Politik: Mereka Yang Terpanggil Untuk Bergerak', *VOA Indonesia*, 16 April 2019 <<https://www.voaindonesia.com/a/relawan-politik-mereka-yang-terpanggil-untuk-bergerak-/4877691.html>>
- Cohen, Jean, Trust, *Voluntary Association and Workable Democracy: The Contemporary American Discourse of Civil Society* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999)
- Eliasoph, Nina, *The Politics of Volunteering* (Cambridge: Polity Press, 2013)
- Fikri, AF, and Akhmad, *Menjadi Politisi Ekstra Parlemerter* (Yogyakarta: LKIS, 1999)
- Ohman, Magnus, *Pedoman Pengawasan Keuangan Politik* (International Foundation for Electoral Systems, 2013)

- Paath, Carlos KY, 'Relawan Politik Muncul Karena Rasa Kecewa Terhadap Parpol', Berita Satu, 2016 <<https://www.beritasatu.com/nasional/370635/relawan-politik-muncul-karena-rasa-kecewa-terhadap-parpol>>
- Samah, Kristin, and Fransisca ria Susanti, Berpolitik Tanpa Partai, Fenomena Relawan Dalam Pilpres (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Savirani, Amalinda, 'Jokowi's Supporters Are to Doubt the "Indonesian Obama"', The Conversation, 2015 <<https://theconversation.com/jokowis-supporters-are-starting-to-doubt-the-indonesian-obama-37843>>
- Suryadi, Suhardi, 'Relawan Politik', Prisma Indonesia, 2014
- Verba, Sidney, Kay Lehman Schlozman, and Henry E Brady, Voice and Equality, Civil Voluntarism in American Politics (Cambridge: Harvard University Press, 1995)
- Walecki, Marcin, Political Finance in Georgia (IPSA/IFES, 2009)
- Wilson, J, Volunteering. Annual Review of Sociology, 2000
- , 'Volunteerism Research: A Review Essay', Nonprofit & Voluntary Sector Quarterly, 41.2 (2012), 176–212

